



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSIHON ANWAR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 747546

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.555.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m²/185 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/90 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1900 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 3780 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 3510 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 4900 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 98.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.107.500.000



III. HUTANG

Rp. 580.710.263

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.526.789.737

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.